

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.01. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik tidak hanya dilihat dari keterlibatannya suatu partai tetapi juga kepada individu calon pemimpin. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Proses demokrasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang dapat disalurkan dalam proses pemilihan umum. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu merupakan bentuk dari tanggungjawab dalam kegiatan politik. Setiajidi (2011) berpendapat bahwa pemilu adalah cara suatu individu atau masyarakat dapat melakukan aktivitas politik dimana masyarakat mempunyai wewenang untuk menentukan partai politik atau calon pemimpin yang akan datang.

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan sarana untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah dan sistem politik yang berlaku. Pada pemilu ini masyarakat dituntut untuk menggunakan hak pilih dengan benar dan mengerti akan kondisi yang ada. Masyarakat mempunyai kekuasaan untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon pemimpin berikutnya. Daud (2015) mengungkapkan bahwa psikologi memandang perilaku manusia (*human behavior*) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Sikap selalu dikaitkan dengan suatu stimulus yang dapat menimbulkan lebih dari satu respon yang berbeda. Skinner (dalam Sarwono, 2015) menambahkan bahwa stimulus dapat diartikan sebuah dorongan yakni makin kuat tingkah laku, maka makin kuat juga dorongan tingkah laku tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dengan partisipasi

masyarakat dalam memberikan suaranya, bagaimana masyarakat akan terdorong untuk dapat berpartisipasi politik.

Hasan (2007) juga mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan politik, ikut serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan.

Lingkungan sosial saling mempengaruhi dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Sikap dan perilaku politik masyarakat terbentuk dari proses sosialisasi masyarakat. Tinggi rendahnya partisipasi politik warga dalam proses politik selalu terkait dengan pengetahuan, sikap dan nilai seseorang kemudian memunculkan orientasi politik. Orientasi tersebut yang kemudian akan membentuk tatanan politik dan akhirnya mempengaruhi perilaku politik yang dilakukan seseorang. Perilaku memilih atau *voting behavior* merupakan keputusan seseorang memilih pasangan calon kandidat tertentu baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Adanya perilaku memilih ini ditimbulkan karena adanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon yang dipercaya dapat memberikan kesejahteraan dan ketentraman bagi rakyatnya. Perilaku memilih tersebut juga dikarenakan adanya informasi-informasi yang tersebar luas di berbagai media sehingga munculnya rasa ketertarikan masyarakat untuk ikut serta dalam perilaku politik.

Keterlibatan masyarakat dalam pemilu merupakan bentuk dari partisipasi politik. Dalam berpartisipasi politik, masyarakat baik laki-laki maupun perempuan bebas untuk memilih calon pemimpin pada pemilihan presiden 2019. Detiknews, 23 Juli 2014 mencatat tingkat partisipasi masyarakat pada pilpres di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan pilpres 2009. Hal ini tentunya tidak lepas dari permasalahan administratif yang membuat pemilih tidak

bisa menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Berikut hasil tingkat partisipasi masyarakat pada pilpres di Indonesia :

Tabel 1.01 Rekapitulasi Persentase Pemilihan Presiden

<b>Tingkat Partisipasi</b>	<b>Persentase</b>
Pilpres tahun 2009	71.17%
Pilpres tahun 2014	69.58%

Sumber : detiknews, 23 Juli 2014

Walaupun jumlah tingkat partisipasi masyarakat di Indonesia tahun 2009 ke tahun 2014 mengalami penurunan, namun berdasarkan data yang ada jumlah suara pilpres 2014 lebih tinggi dari pada jumlah suara pilpres 2009 ini menunjukkan bahwa tingginya antusiasme masyarakat dalam pilpres 2014. Informasi ataupun perdebatan mengenai pilpres dengan mudahnya didapatkan melalui berbagai media massa sehingga masyarakat aktif dan selektif dalam pilpres Jateng 2014. Berikut tingkat jumlah suara masyarakat pada pilpres Jateng:

Tabel 1.02 Rekapitulasi Persentase Jumlah Suara Sah Pilpres Jateng

<b>Tingkat Partisipasi</b>	<b>Jumlah Suara</b>
Pilpres tahun 2009	17.490.429
Pilpres tahun 2014	19.445.260

Sumber : Kompas, 22 Juli 2014

Pemilihan Presiden (Pilpres) Jawa Tengah periode 2014-2019 diikuti dua pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Perolehan suara dari masyarakat dalam Pilpres Jawa Tengah merupakan salah satu faktor penting atas terpilihnya salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jawa Tengah periode 2014-2019. Berikut hasil perolehan suara pilpres Jateng 2014 :

Tabel 1.03 Tabel Perolehan Suara Pilpres Jateng 2014

No	Capres/Cawapres	Perolehan Suara	Persentase
1	Prabowo-Hatta	6.485.720	33.35%
2	Jokowi-JK	12.959.540	66.65%

Sumber : Kompas, 22 Juli 2014

Calon pemimpin saling bersaing berargumentasi untuk mendapatkan kursi yang layak ditempati namun itu semua merupakan hak penuh yang didapatkan masyarakat baik itu merupakan masyarakat yang sudah pernah memilih maupun masyarakat yang baru menjadi pemilih baik laki-laki maupun perempuan dalam menentukan calon pasangan yang layak menjadi pemimpin. Baru-baru ini dilakukannya pemilihan suara masyarakat yaitu pada pilkada Jateng 2018. Komisi Pemilihan Umum mencatat bahwa partisipasi perempuan lebih tinggi dari pada partisipasi laki-laki dalam pilkada Jateng 2018. Berikut hasil data partisipasi masyarakat :

Tabel 1.04 Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pilkada Jateng 2018

Jumlah Pemilih	
Laki-Laki	Perempuan
13.621.444	13.727.434

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Dilansir dari detiknews, 10 Mei 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat bahwa angka partisipasi masyarakat pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi masyarakat tahun 2009. Pada pemilu 2014, KPU menetapkan target yang diharapkan jumlah suara tingkat partisipasi masyarakat terbilang cukup besar yakni sebesar 75% namun pada hasil akhir penghitungan suara, jumlah suara yang didapatkan melebihi target yang ada yakni sebesar 75.11%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2016) mengenai orientasi memilih calon dan partisipasi politik masyarakat Desa Wirata Agung dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Lampung Tengah tahun 2015 menyatakan orientasi memilih masyarakat setempat memilih berdasarkan pilihan rasional yaitu memilih berdasarkan kepedulian pada masyarakat dengan memberikan bantuan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat tersebut 68% aktif menggunakan hak pilihnya sedangkan 32% tidak aktif menggunakan hak pilihnya. Penelitian mengenai partisipasi politik juga dilakukan oleh Hendrizal,dkk (2013) mengenai faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pilkada kota Padang tahun 2013 yang menyatakan 25% orientasi masyarakat dalam memilih merupakan atas pilihan sendiri namun 75% menyatakan memilih tidak berdasar pilihannya sendiri ada faktor lain yang mempengaruhi dan terdapat 17.15% partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan politik, 82.85% masyarakat tidak mengikuti kegiatan politik.

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat juga dilakukan oleh Lestari (2009) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2008 yang menyatakan tingkat partisipasi politik masyarakat di kabupaten Purworejo menunjukkan 61.2% responden kurang berpartisipasi aktif dalam Pilgub Jateng 2008 dan orientasi memilih yang dilakukan masyarakat berdasarkan pilihan rasional pilihannya sendiri. Pemilihan yang berlangsung terkumpul 51.2% yang diantaranya memilih berdasarkan pilihannya sendiri dan penilaian yang paling banyak menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih adalah latar belakang/karakter pribadi calon gubernur dari 73.6% responden yang memberikan suara.

Yustiningrum dan Ichwanuddin (2015) menjelaskan ada tiga model pendekatan dalam partisipasi politik yaitu :

1. Pendekatan sosiologis meliputi status sosial, agama, daerah tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan jenis kelamin dan usia.
2. Pendekatan psikologis, terdapat tiga macam pendekatan model psikologis yaitu persepsi dan penilaian terhadap kandidat, persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat, dan identifikasi partai atau *partisipanship*. *Partisipanship* atau identifikasi partai dapat digambarkan sebagai keanggotaan psikologis dimana memilih berdasarkan orientasi afektif terhadap partai.
3. Pendekatan rasional menekankan pada motivasi individu untuk memilih ataupun tidak dan bagaimana memilih berdasarkan sebuah keuntungan yang akan didapatkannya.

Pendekatan tingkah laku berpusat pada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan tertentu sedangkan pendekatan pluralisme berpusat pada interaksi dan kooperatif antar manusia yang membentuk tingkah laku organisasi. Kajian mengenai pendekatan tingkah laku meliputi: opini, voting, koalisi kekerasan, negosiasi politik sedangkan pendekatan pluralisme meliputi partai politik, sistem pemilu dan lain sebagainya.

Teori atribusi sosial akan diwujudkan kedalam sikap yang akan dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk masyarakat berpartisipasi politik. Rusmanto (2013) mengungkapkan sikap merupakan suatu keadaan dimana individu berinteraksi terhadap lingkungan. Sikap juga merupakan suatu respon atau reaksi seseorang dari suatu stimulus yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan perilaku. Seseorang yakin bahwa

tindakan yang akan dilakukan akan menimbulkan dampak positif dalam dirinya, mereka akan cenderung bersikap melakukan tindakan tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika masyarakat melakukan tindakan yang dilakukan berdampak negatif ia akan bersikap menolak melakukan tindakan tersebut. Hal ini disebut sebagai *behavior belief*. Azwar (dalam Zuchdi, 1995) menjelaskan sikap terdiri dari tiga komponen yaitu:

a. Komponen Kognitif

Komponen kognitif berisi persepsi dan kepercayaan yang dimiliki individu mengenai objek. Komponen ini meliputi pengetahuan masyarakat dan pandangan atau opini dalam pemikiran.

b. Komponen Afektif

Komponen ini melibatkan perasaan atau emosi. Reaksi emosional dapat ditentukan oleh suatu objek.

c. Komponen Konatif

Komponen ini cenderung seseorang berperilaku dalam situasi tertentu terhadap stimulus yang ada.

Azwar (2013) mengungkapkan bahwa sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1. Lingkungan

a. Rumah

Dalam hal ini peranan orang tua sangat penting untuk membentuk pengetahuan anak yang akan membentuk sikap anak tersebut.

b. Sekolah

Peranan guru dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, sikap anak dalam membentuk kepribadiannya. Guru senantiasa memberikan dorongan dan motivasi dalam membentuk kepribadian anak.

c. Lingkungan Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan sangat berperan dalam mekanisme pembentukan sikap. Dalam hal ini, kenyamanan pada lingkungan kerja akan membawa sikap positif terhadap pekerjaannya.

2. Pengalaman

Pengalaman merupakan apa yang telah dan sedang dialami oleh seseorang. Pengalaman akan membentuk dan mempengaruhi seseorang terhadap stimulu sosial. Pengalaman dapat mempengaruhi seseorang dalam bersikap.

3. Pendidikan

Pendidikan dapat berpengaruh terhadap pembentukan sikap seseorang yang ditentukan oleh kepribadian, pengetahuan, dan minat.

Peneliti melakukan wawancara singkat kepada 25 orang yang berusia 17 tahun atau lebih yang belum atau akan menggunakan hak pilihnya mengenai orientasi politik pada partisipasi politik dan hal-hal yang berhubungan dengan isu politik saat ini, berikut hasil data wawancara singkat :

Tabel 1.05 Hasil Survei Awal Wawancara Partisipasi Politik

No	Usia	Jumlah	Persentase	Keterangan	Status
1.	19-22 tahun	6 orang	24%	Tidak ikut berpartisipasi	Mahasiswa
2.	30-40 tahun	10 orang	40%	Ikut berpartisipasi	Bekerja
3.	41-50 tahun	4 orang	16%	Ikut berpartisipasi	Bekerja
4.	45-55 tahun	5 orang	20%	Ikut berpartisipasi	Bekerja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 25 orang tersebut cenderung ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya namun terkadang masyarakat akan memilih berdasarkan keputusan komunitas kelompok. Hal ini tentunya kurangnya pemahaman mengenai kepribadian ataupun kebijakan yang sudah dilakukan, salah atau tidaknya keputusan yang di ambil untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat penting dalam meramaikan situasi politik. Partisipasi politik dapat mengapresiasi masyarakat supaya menggunakan hak pilihnya dan bertujuan untuk menegakkan demokrasi yang ada. Partisipasi masyarakat ini juga menjadikan masyarakat untuk turut aktif memberikan tanggapan maupun pendapat. Maka peneliti mengangkat permasalahan yang ada dan mengadakan penelitian dengan rumusan masalah “Survei Partisipasi Politik Warga Pada Pemilihan Presiden di Kelurahan Pandean Lamper Semarang”

### **1.02. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pada pemilihan presiden di Kelurahan Pandean Lamper Semarang Timur.

### **1.03. Manfaat Penelitian**

#### **1.03.01. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam bidang psikologi sosial melalui pentingnya dalam berpartisipasi politik.

#### **1.03.02. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi tentang partisipasi politik masyarakat.